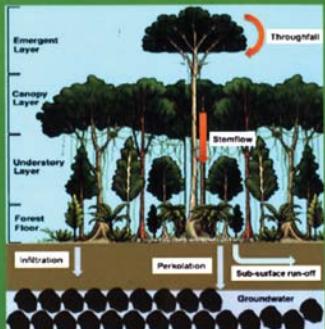


dengan kemiringan tinggi) dan tidak mengalir di atas permukaan tanah yang akan mengakibatkan banjir, tetapi menyalur melalui tajuk (*through-fall*) kemudian melalui batang (*stemflow*). Di permukaan tanah air meresap ke dalam tanah (*infiltration*) yang kemudian mengalir dalam bentuk aliran bawah permukaan tanah dan tersimpan dalam tanah dalam bentuk air tanah. Peranan stratifikasi tajuk dalam perlindungan rata air serta pencegahan erosi dan banjir disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 Peranan stratifikasi tajuk dalam perlindungan rata air serta pengurangan erosi dan banjir

SOLUSI

Untuk mengatasi bencana ekologis di Jawa dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat kerusakan lahan dengan cara memperbaiki kualitas ekosistem. Peningkatan keanekaragaman hayati melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan vegetasi pada hutan dan lahan akan mampu memperbaiki kualitas ekosistem. Pilihan dan rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas ekosistem di Jawa, antara lain:

Regulasi

- Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di daerah.
- Implementasi instrumen pencegahan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategik Rencana Tata Ruang Wilayah; AMDAL dan dokumen lingkungan lainnya
- Perumusan kebijakan di tingkat Pusat (KLHK dan Kementerian Dalam Negeri) untuk mendorong IKLH (ITV) masuk dalam RPJMD dan sebagai indikator kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan lingkungan.
- Perlu merevisi/moratorium kebijakan atau Perda kab/kota yang cenderung mengeksplorasi SDA, khususnya hutan.

Teknis

- Mendorong dan menggalakkan kegiatan penanaman pohon di lahan-lahan kritis, baik secara Swakelola, pemberdayaan dunia usaha, maupun inisiatif masyarakat.
- Mempertanyakan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan.

Sosial/Budaya

- Sosialisasi terhadap masyarakat pentingnya menjaga dan melestariakan hutan.
- Mengampanyekan gerakan menanam satu pohon satu orang.
- Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan agar hutan tetap terjaga kelestariannya.
- Menadukung dan melestariakan keanekan lokal yang berkaitan dengan hutan



RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk Jawa saat ini mencapai 149 juta jiwa atau 57 % dari jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2017). Padahal, luas daratan Jawa hanya 132.107 km² atau sekitar 13.210.700 ha. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan untuk pemukiman, industri, pertanian, pertambangan dan pariwisata/jasa.

Akibatnya, terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan tutupan vegetasi terus berkurang. Dalam 27 tahun (1990 - 2017) terjadi penurunan lausan tutupan vegetasi sebesar 156.761 Ha. Penurunan terbesar pada lausan hutan dan semak belukar. Laju penurunan laus tutupan vegetasi ditinggi dengan peningkatan aktivitas manusia dalam pembangunan perumahan, kawasan tambak dan lahan pertanian lahan kering (773.313 Ha) (diolah dari data penggunaan lahan KLHK).

Pemanfaatan lahan yang melampaui daya dukung dan daya tampung menyebabkan lausan lahan kritis dan lahan sangat kritis di Jawa terus meningkat. Tahun 2013 lausan sebesar 1.738.800 ha dengan rincian lahan kategori sangat kritis 787.600 ha dan lahan kategori kritis sebesar 951.200 ha (Statistik KLHK, 2015).

Menyusutnya laus tutupan vegetasi dan meningkatnya lahan kritis itu menyebabkan Jawa rawan terjadi bencana banjir dan longsor. Dari 2000 - 28 Februari 2018, seidikitnya terjadi banjir 3.913 kali dan longsor 3.606 kali. Atau, sekitar 64 % dari total bencana 12.467 kali. Bencana ekologis merupakan suatu kejadian kondisi alam dan lingkungan tidak seperti biasanya sebagai akibat dari perubahan iklim, kerusakan dan kerosotan hayati serta kepunahan ekosistem. Untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki kualitas ekosistem, meningkatkan keanekaragaman hayati melalui peningkatan kuantitas dan kualitas tutupan vegetasi pada hutan dan lahan. Perangkat kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah dengan memasukkan nilai IKLH (khususnya nilai Indeks Tutupan Vegetasi) sebagai indikator kinerja dierat dalam RPJMD provinsi/kab/kota.

MENYELAMATKAN JAWA

MELALUI PENINGKATAN TUTUPAN VEGETASI

PENDAHULUAN

Tahun 2016, dalam sebuah diskusi berajak, "Krisis Ekologi Pulau Jawa dan Daya Tahan Sosial Menghadapinya," para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIP) menuturkan, Pulau Jawa saat ini sudah mengalami krisis ekologi. Pemangkasan dan eksploitasi sumber daya alam di pulau ini telah melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya, selain intensitas bencana alam meningkat juga terjadi penurunan keanekaragaman hayati, dan masalah sosial terutama di perkotaan.

Indikasi krisis ini sudah ditemukan sejak 10 tahun lalu, berdasarkan penelitian ahli ekologi manusia dari Institut Pertanian Bogor, Suryo Adiwibowo. Penelitian ini kemudian diperbarui lima tahun kemudian. Hasilnya, krisis ekologi sudah terjadi dan makin parah. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor utama terjadinya krisis ekologi ini adalah meningkatnya populasi penduduk, konsentrasi pemusatan ekonomi di Jawa dan pembangunan infrastruktur.



Perubahan penggunaan lahan yang berlirutannya menjadi penggunaan lahan lain yang terjadi secara terus menerus dengan metode pengolahan yang kurang tepat akan mempercepat laju penurunan kualitas lahan. Terjadinya hal tersebut secara kontinu mengakibatkan terciptanya lahan kritis, yaitu lahan yang mengalami kerusakan kesuburan baik secara fisika, kimia maupun biologis. Sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi lagi sebagai media produksi komersial (pertanian, kebun, dll) maupun sebagai media peningataan tata air.

Tingkat kerkrisan lahan di Ekoregion Jawa sendiri menunjukkan nilai yang mencengangkan. Data Statistik KLHK tahun 2015, luas lahan kritis kategori sangat kritis dan kritis di Pulau Jawa pada tahun 2013 telah mencapai luasan sebesar 1.738.800 ha dengan rincian lahan kategori sangat kritis 787.600 ha dan lahan kategori kritis sebesar 951.200 ha.

Data Perubahan penggunaan lahan vegetasi dan non vegetasi di Ekoregional Jawa

Penggunaan lahan	1990	2000	2011	2017	perubahan 1990 - 2017
Non veg/tosi	5.256.447	5.403.270	5.554.991	5.410.751	154.304
Permukiman/Lahan Terbangun	1.078.879	1.156.911	1.307.684	1.532.987	454.109
Sawah	4.024.405	4.076.772	4.076.772	3.683.505	-340.900
Tambak	153.164	169.586	170.534	194.259	41.095
Vegetasi	8.160.588	7.972.204	8.002.662	8.003.827	-156.761
Hutan	3.447.402	3.479.578	3.272.008	3.281.742	-165.659
Mangrove/Hutan Rawa	48.624	45.570	38.680	37.732	-10.892
Kebun	405.894	408.790	410.434	391.833	-14.061
Pertanian lahan kering	3.876.022	3.761.238	3.994.787	4.154.132	278.110
Semak	382.647	277.028	286.753	138.389	-244.258

Sumber: PIJF diolah dari peta penggunaan lahan KLHK²

Berkurangnya kemampuan lahan dan hutan dalam menjaga fungsi-fungsinya untuk mengatur tata air menjadi faktor utama yang menyebabkan Jawa sering terjadi bencana ekologis belakangan ini. Hal ini ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam menanggapi kejadian bencana banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Jawa Barat dan Jakarta³.

1. Keadaan jarak dan pergerakan berdasarkan data penggunaan lahan yang diolah dalam kantong Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Manajemen Lahan adalah adalah hutan primer, hutan sekunder, mangrove, perkebunan, areal pertanian dan tanah kosong.
2. Pengolahan data dari situs resmi PIJF (Peta Indonesia Jaya), <http://www.pijf.or.id/index.php?view=12&id=10> (diakses pada 20 Mei 2018)

BENCANA EKOLOGIS EKOREGION JAWA

2000 - 2018
12.467
BENCANA

3 Bencana Paling Sering Terjadi

Longsor
32 PERSON

Ruang Belling
30 PERSON

Banjir
34 PERSON

1227 PERSON
1008

572 PERSON
1190

1633 PERSON
1228

Data BNPB diolah PIJF

PERAN TUTUPAN VEGETASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA EKOLOGIS

Pada dasarnya pemicu utama terjadinya bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan puning belung adalah terjadinya cuaca ekstrim yang diperburuk dengan kondisi ekologi yang telah mulai rusak. Memutus Gingting kerusakan ekologi terjadi karena perubahan penggunaan lahan dan yang berhutan atau menjadi penggunaan lahan lain yang tidak berhutan sehingga menghilangkan fungsiannya dalam pengamatan tata air.

Berkurangnya tutupan hutan/vegetasi dan tingkat kerkrisan lahan yang tinggi di daerah hulu atau pegunungan menyebabkan fungsi lahan sebagai daerah tangkapan air (penadah/ penyimpan air) menurun. Pada daerah hulu atau dataran, memutusnya tumpang vegetasi dan lahan yang kritis meningkatkan limpasan permukaan (airan air yang menyalurkan air di atas permukaan tanah karena penumbuhan kapasitas infiltrasi tanah).

Vegetasi di sini berfungsi untuk meningkatkan penyepuran/infiltrasi air ke dalam tanah sehingga mengurangi limpasan permukaan yang memicu terjadinya banjir dan longsor. Vegetasi memiliki peran sebagai pencegah erosi dan banir, serta pengatur tata air. Dalam menjalankan fungsi tersebut, proses interaksi hutan dan lingkungan sangat berkaitan dengan siklus hidrologi yang terjadi.

Dalam siklus hidrologi, terjadi pengurusan air dari tanaman, tanah, dan air (laut, danau, sungai, dan air terbuka lainnya) yang disebut juga evapotranspirasi, kemudian air menguap ke atmosfer dalam bentuk uap air dan terkondensasi di udara membentuk awan lalu kemudian terjadi hujan atau dapat disebut juga presipitasi. Air hujan tersebut dapat langsung jatuh ke permukaan tanah sehingga terjadi aliran permukaan (run-off) dan dapat jatuh melalui tajuk pohon (throughfall) kemudian mengalir melalui batang (stemflow) dan terserap ke dalam tanah (infiltration) menjadikan aliran bawah permukaan (sub-surface runoff) maupun tersimpan dalam tanah menjadi air tanah (ground water storage). Siklus hidrologi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Siklus hidrologi

3. Langsung Ginting, Direktorat Eksekutif Wabaka Lingkungan Hidup Indonesia pada permasalahan kepada Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2012 tentang Program Manajemen Lahan adalah adalah hutan primer, hutan sekunder, mangrove, perkebunan, areal pertanian dan tanah kosong.